

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Signalling Theory

Teori sinyal pertama kali diperkenalkan oleh Michael Spence dalam penelitiannya yang berjudul *Job Market Signalling*. Menurut Spence (1973) dalam penelitiannya yang berjudul “Job Market Signaling” mengusulkan bahwa individu dapat mensinyalkan kemampuan atau kualitas mereka kepada pemberi kerja dengan memperoleh pendidikan atau kredensial yang mahal dan sulit didapatkan. Sinyal-sinyal ini berfungsi sebagai sarana bagi individu untuk membedakan diri mereka dari orang lain di pasar tenaga kerja. Dengan berinvestasi dalam pendidikan atau memperoleh kredensial tertentu, individu memberikan sinyal yang kredibel tentang kemampuan mereka, yang dapat meningkatkan peluang mereka dipilih oleh pemberi kerja. Spence menyajikan model sinyal yang menyoroti interaksi antara pemberi kerja dan pencari kerja. Menurut model ini, individu dengan kemampuan yang lebih tinggi lebih cenderung berinvestasi dalam sinyal yang mahal, karena mereka dapat menunjukkan keterampilan unggul mereka melalui sinyal-sinyal ini. Pemberi kerja, di sisi lain, menggunakan sinyal-sinyal ini sebagai dasar untuk membuat keputusan perekrutan, karena mereka mengandalkan korelasi antara sinyal dan kemampuan dasar individu.

Menurut Ghozali (2020), “teori sinyal menjelaskan perilaku dua pihak, ketika mereka mengakses informasi yang berbeda. Teori sinyal menjelaskan tindakan yang diambil oleh pemberi sinyal (*signaler*) untuk mempengaruhi perilaku penerima sinyal. Sinyal diartikan sebagai isyarat yang dilakukan oleh perusahaan (manajer) kepada pihak luar (investor). Teori sinyal berkaitan dengan pemahaman tentang bagaimana suatu sinyal sangat bernilai atau bermanfaat sementara sinyal yang lain tidak berguna. Teori sinyal mencermati bagaimana sinyal berkaitan dengan kualitas yang dicerminkan di dalamnya dan elemen-elemen apa saja dari sinyal atau komunitas sekitarnya yang membuat sinyal tersebut tetap meyakinkan

dan menarik. Selain itu, teori ini juga mencermati apa yang akan terjadi manakala sinyal yang diisyaratkan tidak sepenuhnya meyakinkan atau seberapa besar ketidakyakinan yang dapat ditoleransi sebelum sinyal tersebut menjadi tidak bermakna sama sekali”.

Alfahruqi *et al.* (2022), mengatakan bahwa “sinyal diberikan perusahaan mengenai kinerja perusahaan dalam aspek keuangan maupun non-keuangan dan pencapaian kinerja yang telah diraih oleh manajemen dalam merealisasikan harapan dan keputusan para pemegang saham. Informasi yang diberikan oleh perusahaan umumnya merupakan catatan atau gambaran mengenai kondisi perusahaan pada masa lalu, saat ini, maupun keadaan di masa yang akan datang. Perusahaan dapat memberikan sinyal terkait modal dasar dan rasio-rasio keuangan”.

Menurut Nurjanah dan Hakim (2018), “laporan keuangan dapat digunakan untuk mengambil keputusan bagi para investor, laporan keuangan merupakan bagian terpenting dari analisis fundamental perusahaan. Menggunakan teori sinyal, informasi berupa *ROA* atau tingkat pengembalian terhadap aset atau juga seberapa besar laba yang didapat dari aset yang digunakan, dengan demikian jika *ROA* tinggi maka akan menjadi sinyal yang baik bagi para investor, karena dengan *ROA* tinggi menunjukkan kinerja perusahaan tersebut baik maka investor akan tertarik untuk menginvestasikan dananya yang berupa surat berharga atau saham”.

2.2 Agency Teory

Agency theory atau teori keagenan pertama kali dikemukakan oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling pada tahun 1976. Teori ini membahas tentang hubungan antara *principal* dengan *agent*. Yang dimaksud dengan *principal* adalah pemilik perusahaan atau pemegang saham, sedangkan *agent* adalah manajer perusahaan. Hubungan agensi terjadi ketika *principal* (pemegang saham) memberikan wewenang kepada *agent* (manajemen) untuk mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Hubungan antara *principal* dan *agent* ini dapat

mengarah pada terjadinya asimetri informasi. Hal ini dapat disebabkan karena agent memiliki informasi lebih banyak mengenai kondisi perusahaan dibandingkan dengan principal. Definisi asimetri informasi menurut Brigham dan Houston (2014) adalah sebagai berikut: “*Asymetric information is the situation where managers have different (better) information about firms' prospects than investors.*”

Menurut Suhendah dan Imelda (2012) dalam Intia dan Azizah (2021) menjelaskan bahwa “asimetri informasi sebagai suatu keadaan dimana pihak manajemen memiliki akses informasi mengenai perusahaan yang tidak dimiliki oleh pihak luar perusahaan dimana hal ini akan menyebabkan terjadinya ketidak seimbangan kepemilikan informasi diantara keduanya. Masalah agensi tidak hanya terjadi antara pemegang saham dengan agen, tetapi juga terjadi antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham non pengendali. Hal ini menyebabkan adanya *conflict of interest*, akibat dari kejadian tersebut maka muncul *agency cost*. Salah satu cara untuk menekan atau mengurangi *agency cost* adalah dengan keberadaan struktur organisasi yang jelas, sehingga dapat menciptakan sistem yang efisien untuk mengatur hubungan kerja sama antara *agent* dan *principal*”.

2.3 Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2021) dalam PSAK 1, “laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas”. Menurut Kasmir (2019), “laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode”. Menurut Kieso *et al.* (2018), “laporan keuangan adalah sarana utama yang digunakan perusahaan untuk berkomunikasi informasi keuangannya kepada pihak di luarnya”.

Menurut Kasmir (2019), “ada beberapa tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan yaitu untuk memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat

ini, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu, memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu, memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan, memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode, memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya”. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2021) dalam PSAK 1, “tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik”.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2021) dalam PSAK 1, “komponen laporan keuangan lengkap terdiri dari:”

- a) “Laporan posisi keuangan pada akhir periode”;
Laporan posisi keuangan menunjukkan jumlah asset, kewajiban, dan modal perusahaan pada periode tertentu.
- b) “Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode”;
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain menunjukkan kondisi usaha dalam suatu periode tertentu yang terlihat dari jumlah pendapatan yang diterima dan biaya yang telah dikeluarkan sehingga dapat diketahui apakah perusahaan memperoleh keuntungan atau kerugian.
- c) “Laporan perubahan ekuitas selama periode”;
Laporan perubahan ekuitas menunjukkan jumlah modal yang dimiliki perusahaan secara actual serta sebab-sebab perubahan modal.
- d) “Laporan arus kas selama periode”;
“Laporan arus kas menunjukkan jumlah pemasukan dan pengeluaran periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan”.

- e) “Catatan atas laporan keuangan, berisi kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain”;
“(ea) informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam paragraf 38 dan 38A”; dan
- f) “Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraf 40A-40D”.

Menurut Weygandt *et al.* (2019), “informasi keuangan yang dibutuhkan pengguna tergantung pada jenis keputusan yang mereka buat. Ada dua kelompok umum pengguna informasi keuangan”:

1. “*Internal Users*”

“Pengguna internal (*internal users*) informasi akuntansi adalah manajer yang merencanakan, mengatur, dan menjalankan bisnis. Dalam pengguna internal (*internal users*) ini termasuk manajer pemasaran (*marketing managers*), supervisor produksi (*production supervisor*), direktur keuangan (*finance directors*), dan pegawai perusahaan (*company officers*)”.

2. “*External Users*”

“Pengguna eksternal (*external users*) adalah individu dan organisasi diluar perusahaan yang menginginkan informasi keuangan tentang perusahaan”.
“Terdapat 2 tipe pengguna eksternal yang paling umum yaitu”:

- i) “*Investors (owners)* menggunakan informasi akuntansi untuk memutuskan apakah akan membeli, menahan, atau menjual kepemilikan saham suatu perusahaan”.
- ii) “*Creditors* (seperti pemasok dan bank) menggunakan informasi akuntansi untuk mengevaluasi risiko pemberian kredit atau peminjaman uang.”

2.4 Profitabilitas

Menurut Lestiowati (2018), “rasio profitabilitas bermanfaat untuk menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan dengan menggunakan sumber daya yang ada di dalam perusahaan selama periode tertentu”. Menurut Weygandt *et al.* (2019), “*profitability ratios measure the income or operating success of a company for a given period of time*” yang berarti “profitabilitas adalah pengukur laba atau keberhasilan dari perusahaan dalam periode yang tertentu”. Wikardi dan Wiyani (2017), “profitabilitas mempunyai arti penting bagi perusahaan karena merupakan salah satu dasar untuk menilai kondisi suatu perusahaan”. Menurut Solekha (2019), “profitabilitas menjadi indikator atau tolak ukur penting bagi investor untuk menanamkan modalnya karena dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan dan tingkat pengembalian yang akan diterima oleh investor.”

Menurut Kasmir (2019), “tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu”:

1. “Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu”;
2. “Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang”;
3. “Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu”;
4. “Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri”;
5. “Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri”;
6. “Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri”;
7. “Dan tujuan lainnya”.

Menurut Weygandt *et al.* (2019), “rasio profitabilitas dapat diukur menggunakan rasio-rasio berikut ini”:

1. “*Profit Margin*”

“*Profit margin* mengukur persentase tiap satuan mata uang penjualan yang menghasilkan laba bersih” (Weygandt *et al.*, 2019).

$$\text{Profit Margin} = \frac{\text{Net income}}{\text{Net sales}} \quad (2.1)$$

Keterangan:

Net income : Laba bersih

Net sales : Penjualan bersih

2. “*Asset Turnover*”

“*Asset Turnover* mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan” (Weygandt *et al.*, 2019).

$$\text{Asset Turnover} = \frac{\text{Net sales}}{\text{Average total assets}} \quad (2.2)$$

Keterangan:

Net sales : Penjualan bersih

Average total assets : Rata-rata dari total aset

3. “*Return on Assets*”

“*Return on assets* mengukur seberapa efisien aset perusahaan dalam menghasilkan laba” (Weygandt *et al.*, 2019).

$$\text{Return on Assets} = \frac{\text{Net income}}{\text{Average total assets}} \quad (2.3)$$

Keterangan:

Net income : Laba bersih tahun berjalan

Average total assets : Rata-rata dari total aset

Dalam menghitung *average total asset*, menurut Weygandt *et al*, (2019) dapat dikut dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Average total asset} = \frac{\text{Asset}_t + \text{Asset}_{(t-1)}}{2} \quad (2.4)$$

Keterangan:

Asset_t : Total aset pada tahun t

Asset_(t-1) : Total aset 1 tahun sebelum tahun t

4. “Return on Ordinary Shareholders’ Equity”

“Return on Ordinary Shareholders’ Equity mengukur berapa banyak satuan mata uang dari laba bersih yang diperoleh perusahaan untuk setiap satuan mata uang yang diinvestasikan oleh pemilik” (Weygandt *et al.*, 2019).

$$\text{Return on Ordinary Shareholders' Equity} = \frac{\text{Net income} - \text{preference dividends}}{\text{Average ordinary shareholders' equity}} \quad (2.5)$$

Keterangan:

Net income : Laba bersih

preference dividends : Dividen preferen

Average ordinary shareholders' equity : Rata-rata ekuitas pemegang saham biasa

5. “*Earnings per Share (EPS)*”

“*Earnings per Share (EPS)* mengukur laba bersih yang didapatkan dari setiap lembar saham” (Weygandt *et al.*, 2019).

$$\text{Earnings per Share} = \frac{\text{Net income} - \text{Preferen dividends}}{\text{Weighted-average ordinary Shares outstanding}} \quad (2.6)$$

Keterangan:

Net income : Laba bersih
preference dividends : Dividen preferen
Weighted-average ordinary shares outstanding : Rata-rata ekuitas pemegang saham biasa

6. “*Price-Earnings Ratio*”

“*Price-Earnings Ratio* mengukur ukuran rasio harga pasar setiap saham biasa terhadap laba per saham” (Weygandt *et al.*, 2019).

$$\text{Price-Earnings Ratio} = \frac{\text{Market price per share}}{\text{Earnings per share}} \quad (2.7)$$

Keterangan:

Market price per share : Harga pasar per lembar saham
Earnings per share : Laba per lembar saham

7. “*Payout Ratio*”

“*Payout Ratio* mengukur persentase pendapatan yang dibagikan dalam bentuk dividen tunai” (Weygandt *et al.*, 2019).

$$\text{Payout Ratio} = \frac{\text{Cash dividends declared on ordinary shares}}{\text{Net income}} \quad (2.8)$$

Keterangan:

Cash dividends declared on ordinary shares : Dividen tunai

Net income : Laba bersih

Menurut Kieso *et al.* (2018), “Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang mengukur keberhasilan operasional suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Laporan laba rugi memiliki komponen-komponen sebagai berikut”:

1. “*Sales*”
“Perhitungan pendapatan bersih atas penjualan yang terdiri dari penjualan, diskon atas penjualan, retur penjualan”.
2. “*Cost of Goods Sold*”
“Harga pokok penjualan merupakan harga pokok barang jadi dalam persediaan yang dijual kepada pelanggan selama periode akuntansi berjalan”.
3. “*Gross Profit*”
“Hasil dari pengurangan antara penjualan dengan harga pokok penjualan”.
4. “*Selling Expenses*”
“Informasi mengenai pengeluaran perusahaan dalam kegiatan penjualan”.
5. “*Administrative or General Expenses*”
“Informasi mengenai pengeluaran perusahaan dalam kegiatan administrasi perusahaan”.
6. “*Other income and expense*”
“Mencakup sebagian besar transaksi lain yang tidak sesuai dengan kategori pendapatan dan beban yang telah disebutkan sebelumnya. Item tersebut dapat berupa keuntungan dan kerugian dari penjualan aset jangka panjang dan penurunan nilai aset. Pendapatan seperti pendapatan sewa, pendapatan

dividen dan pendapatan bunga juga dilaporkan dalam bagian *other income and expense*”.

7. “*Income from Operations*”
“Hasil dari pengurangan antara *gross profit* dengan *selling expense* dan *administrative* atau *general expense* serta ditambah atau dikurangi dengan *other income and expense* maka menjadi *income from operations*. *Income from operations* merupakan penghasilan perusahaan yang didapatkan dari operasi normal”.
8. “*Financing Costs*”
“Informasi mengenai pengeluaran perusahaan dalam kegiatan pembiayaan seperti beban bunga”.
9. “*Income Before Income Tax*”
“Merupakan total pendapatan sebelum pajak atau hasil dari pengurangan *income from operations* dengan *financing cost*”.
10. “*Income Tax*”
“Pajak yang dipungut atas penghasilan sebelum pajak penghasilan.”
11. “*Income from Continuing Operations*”
“Merupakan hasil perusahaan sebelum keuntungan atau kerugian dari operasi yang dihentikan, jika tidak memilikinya maka bagian ini tidak dilaporkan dan jumlahnya akan dilaporkan sebagai laba bersih”.
12. “*Discontinued Operations*”
“Merupakan keuntungan atau kerugian dari operasional perusahaan yang dihentikan.”
13. “*Net Income*”
“Merupakan hasil bersih dari kinerja perusahaan selama periode tertentu.”
14. “*Non-Controlling Interest*”
“Menampilkan alokasi dari laba bersih perusahaan untuk pemegang saham pengendali serta untuk kepentingan non pengendali yang muncul jika terdapat konsolidasi perusahaan”.
15. “*Earning per Share*”

“Merupakan laba per lembar saham yang dilaporkan”.

Menurut Kieso *et al.* (2018), “terdapat empat jenis laba yaitu:”

1. “*Gross Profit*”

“*Gross profit* atau laba kotor dihitung dengan mengurangi harga pokok penjualan dari penjualan bersih. Pelaporan laba kotor memberikan angka yang berguna untuk mengevaluasi kinerja dan memprediksi pendapatan masa depan”.

2. “*Income from Operations*”

“Pendapatan dari operasi dengan mengurangi penjualan dan biaya administrasi serta pendapatan dan beban lain dari laba kotor. Pendapatan dari operasi menyoroti item yang mempengaruhi kegiatan bisnis reguler. Sebagai demikian, ini adalah metrik yang sering digunakan oleh analis dalam membantu memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan”.

3. “*Income Before Income Tax*”

“Total laba/*income* perusahaan sebelum pajak”.

4. “*Net Income*”

“Laba bersih merupakan pendapatan setelah semua pendapatan dan beban untuk periode tersebut dipertimbangkan. Hal ini dipandang oleh banyak orang sebagai ukuran yang paling penting dari perusahaan keberhasilan atau kegagalan untuk jangka waktu tertentu”.

Menurut Kieso *et al.* (2018), “pendapatan bersih (*net income*) adalah hasil bersih dari kinerja perusahaan dalam periode waktu tertentu. Pendapatan bersih yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laba bersih tahun berjalan perusahaan”. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2021) dalam PSAK 1, “laba tahun berjalan didapatkan dengan cara pendapatan dikurangi dengan beban pokok penjualan

kemudian akan menghasilkan laba bruto. Setelah itu, laba bruto ditambah dengan penghasilan lain dan bagian laba entitas asosiasi dan dikurangi dengan biaya distribusi, beban administrasi, beban lain-lain, biaya pendanaan yang akan menghasilkan laba sebelum pajak. Selanjutnya laba sebelum pajak akan dikurangi beban pajak penghasilan yang akan menghasilkan laba tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan kemudian dikurangi kerugian tahun berjalan dari operasi yang dihentikan yang akan menghasilkan laba tahun berjalan”.

Kieso *et al.* (2018) menjelaskan contoh penyajian laba tahun berjalan dalam laporan laba rugi sebagai berikut:

BOC HONG COMPANY INCOME STATEMENT FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019		
Net sales		\$2,972,413
Cost of goods sold		1,982,541
Gross profit		989,872
Selling expenses (see Note D)	\$453,028	
Administrative expenses	350,771	803,799
Other income and expense		171,410
Income from operations		357,483
Interest expense		126,060
Income before income tax		231,423
Income tax		66,934
Net income for the year		\$ 164,489
Attributable to:		
Shareholders of Boc Hong		\$ 120,000
Non-controlling interest		44,489
Earnings per share		\$1.74

Gambar 2. 1 Penyajian Laba Tahun Berjalan dalam Income Statement

Sumber: Kieso *et al.* (2018)

Weygandt *et al.* (2019), mengatakan “*assets are the resources a business owns*”. Artinya, “aset adalah sumber daya yang dimiliki bisnis”. Menurut Kieso *et al.* (2018), “aset terbagi menjadi dua yaitu aset tidak lancar (*non-current assets*) dan aset lancar (*current asset*)”. Sedangkan menurut IAI (2018) dalam PSAK, “aset berisikan sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan mengalir ke entitas”. Lebih lanjut lagi IAI (2018) mengatakan, “aset diakui dalam laporan posisi keuangan ketika manfaat ekonomiknya di masa depan dapat dipastikan mengalir ke

dalam entitas dan aset tersebut memiliki biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam laporan posisi keuangan jika manfaat ekonomiknya dipandang tidak mungkin mengalir ke entitas walaupun pengeluaran telah terjadi” (IAI, 2018).

Menurut Kieso *et al.* (2018), “aset tidak lancar (*non-current assets*) terbagi menjadi 4 kelompok yaitu:

1. “Investasi Jangka Panjang (*long-term investments*)”

“*Long-term investments* dikelompokkan menjadi 4 tipe, yaitu: investasi pada sekuritas seperti obligasi, saham, atau *long-term notes*, investasi pada aset berwujud yang tidak sedang digunakan pada operasi perusahaan seperti tanah yang dimiliki untuk spekulasi, investasi pada *special funds* seperti *sinking funds*, *pension funds*, atau *plant expansion fund*, investasi pada *non-consolidated subsidiaries* atau *associated companies*”.

2. “Properti, Pabrik, dan Peralatan (*property plant and equipment*)”

“*Property, plant, equipment* adalah aset berwujud jangka panjang yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Aset ini terdiri dari *physical property* seperti tanah, bangunan, mesin, furniture, alat, dan *wasting resources (minerals)*. Terkecuali tanah, perusahaan mendepresiasi atau mendepleksikan aset-aset tersebut”.

3. “Aset Tidak Berwujud (*intangible assets*)”

“*Intangible assets* merupakan aset yang tidak memiliki wujud fisik dan bukan sebuah instrumen keuangan. *Intangible assets* dapat merupakan *patent, copyrights, franchises, goodwill, trademarks, trade names*, dan *customer lists*. Perusahaan melakukan amortisasi terhadap *limited-life intangible assets* sepanjang masa manfaatnya”

4. “Aset lainnya (*other asset*)”

“*Other assets* pada praktiknya memiliki banyak macam seperti contoh yaitu *long-term prepaid expenses* dan *non-current receivables*. Aset lain yang termasuk dalam kelompok ini adalah aset dana khusus, properti yang dimiliki untuk dijual dan *restricted cash*. Total aset yang terdapat di dalam laporan posisi keuangan merupakan jumlah keseluruhan aset lancar dan aset tidak lancar”.

Menurut Kieso *et al.* (2018), “aset lancar (*current assets*) aset lancar adalah uang tunai dan aset lain yang diharapkan perusahaan untuk dikonversi menjadi uang tunai, dijual, atau dikonsumsi baik dalam satu tahun atau dalam operasi siklus, mana yang lebih lama. Lima item yang terdapat dalam aset lancar yaitu:

1. “*Inventories*”
“Untuk menyajikan persediaan dengan tepat, perusahaan mengungkapkan dasar penilaian dan asumsi arus biaya yang digunakan”.
2. “*Prepaid Expenses*”
“Perusahaan memasukkan biaya dibayar di muka dalam aset lancar jika akan menerima manfaat (biasanya layanan) dalam satu tahun atau siklus operasi, mana yang lebih lama”.
3. “*Receivables*”
“Perusahaan harus secara jelas mengidentifikasi kerugian yang diantisipasi karena tidak tertagihnya jumlah dan sifat dari setiap piutang non-usaha, dan setiap piutang yang digunakan sebagai jaminan. Kategori utama piutang harus ditunjukkan dalam laporan posisi keuangan atau catatan terkait”.
4. “*Short-term investments*”
“Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, perusahaan harus melaporkan sekuritas perdagangan (baik utang atau ekuitas) sebagai aktiva lancar. Ini mengklasifikasikan investasi non-perdagangan individu sebagai lancar atau tidak lancar, tergantung pada keadaan. Ini harus melaporkan diadakan-untuk-koleksi (kadang-kadang disebut sekuritas yang dimiliki hingga jatuh

tempo) dengan biaya perolehan diamortisasi. Semua perdagangan sekuritas dilaporkan sebesar nilai wajar”.

5. “Cash and cash equivalents”

“Uang tunai umumnya dianggap terdiri dari mata uang dan giro (uang tersedia sesuai permintaan di lembaga keuangan). Setara kas bersifat jangka pendek, investasi yang sangat likuid yang akan jatuh tempo”.

Menurut Kieso *et al.* (2018), “contoh penyajian aset dalam laporan posisi keuangan sebagai berikut”:

SCIENTIFIC PRODUCTS, INC.			
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION			
DECEMBER 31, 2019			
Assets			
Non-current assets			
<i>Long-term investments</i>			
Investments in held-for-collection securities		\$ 82,000	
Land held for future development		5,500	\$ 87,500
<i>Property, plant, and equipment</i>			
Land		125,000	
Buildings	975,800		
Less: Accumulated depreciation	341,200	634,600	
Total property, plant, and equipment			759,600
<i>Intangible assets</i>			
Capitalized development costs		6,000	
Goodwill		66,000	
Other identifiable intangible assets		28,000	100,000
Total non-current assets			947,100
Current assets			
Inventory		489,713	
Prepaid expenses		16,252	
Accounts receivable	165,824		
Less: Allowance for doubtful accounts	1,850	163,974	
Short-term investments		51,030	
Cash and cash equivalents		52,485	
Total current assets			773,454

Gambar 2. 2 Penyajian Aset dalam Laporan Posisi Keuangan

Sumber: Kieso *et al.* (2018)

Dalam penelitian ini, profitabilitas perusahaan diprosikan menggunakan *Return on Assets (ROA)*. Menurut Gustika dan Yeni (2019), “*return on asset (ROA)* merupakan rasio yang terpenting diantara rasio profitabilitas yang ada”. Weygandt *et al.*, (2019), menjelaskan bahwa “*return on asset* adalah rasio untuk mengukur profitabilitas yang dihasilkan menggunakan aset perusahaan”. Menurut Budiang *et al.* (2017), “semakin tinggi *ROA* menunjukkan semakin baik perusahaan menggunakan seluruh asetnya dalam menghasilkan laba”. Menurut Lukviarman

(2016:55) dalam Hamid (2021), “standar industri *return on asset* adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Standar Industri *Return on Asset*

Standar	Kriteria
> 5,98%	Sangat Baik
4,00% - 5,98%	Baik
2,50% - 3,98%	Cukup Baik
1,50% - 2,49%	Kurang Baik
< 1,50%	Buruk

Sumber: Lukviarman (2016:55)

Menurut Firman (2018), “rasio *return on asset* ini sering dipakai manajemen untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan dan menilai kinerja operasional dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki perusahaan, disamping perlu mempertimbangkan masalah pembiayaan terhadap aktiva tersebut”. “Dalam analisis laporan keuangan, *ROA* paling sering dilihat, karena dapat menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. *ROA* mampu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang. Aset atau aktiva yang dimaksud adalah keseluruhan harta perusahaan, yang diperoleh dari modal sendiri maupun dari modal asing yang telah diubah perusahaan menjadi aktiva-aktiva perusahaan yang digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan” (Zulkarnaen, 2018). Menurut Sawir (2005:18) dalam Ramadani *et al.* (2021), “*return on asset (ROA)* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan, semakin besar nilai *ROA* semakin besar tingkat keuntungan perusahaan dalam penggunaan aset”. Menurut Eforis dan Pioleta (2019) “semakin tinggi *return on assets* menunjukkan efisiensi manajemen aset karena perusahaan dapat memaksimalkan laba yang didapatkan dengan penggunaan aset yang seminimal mungkin”.

2.5 Debt to Equity Ratio

Menurut Zutter dan Smart (2019), “DER adalah rasio yang digunakan untuk mengukur proporsi relatif dari total utang dan ekuitas pemegang saham biasa yang digunakan untuk membiayai total aset perusahaan”. “Nilai dari *debt to equity ratio* (DER) dapat dicari dengan rumus sebagai berikut” (Ross *et al.*, 2019):

$$DER = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Equity}} \quad (2.9)$$

Keterangan:

DER: *Debt to Equity Ratio*

Total debt: Total utang

Total equity: Total ekuitas

Menurut IAI (2018) dalam kerangka konseptual pelaporan keuangan, “liabilitas adalah kewajiban kini entitas untuk mengalihkan sumber daya ekonomi sebagai akibat peristiwa masa lalu”. Weygandt *et al.* (2019), “liabilitas diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu: kewajiban jangka pendek (*current liabilities*) dan kewajiban jangka panjang (*non-current liabilities*). Kewajiban jangka pendek (*current liabilities*) adalah kewajiban yang diharapkan perusahaan untuk dibayar dalam satu tahun atau siklus operasi. Berbagai jenis kewajiban lancar termasuk wesel bayar, utang usaha, pendapatan yang belum diperoleh, dan kewajiban yang masih harus dibayar seperti pajak, gaji dan upah, dan utang bunga”. Sedangkan menurut Weygandt *et al.* (2019) “kewajiban jangka panjang (*non-current liabilities*) adalah kewajiban yang perusahaan harapkan untuk dibayar lebih dari satu tahun di masa depan. Kewajiban ini sering dalam bentuk obligasi atau wesel jangka panjang”.

Menurut Kieso *et al.* (2018), “terdapat tiga konsep kewajiban jangka pendek (*current liabilities*), sebagai berikut”:

1. “Utang yang dihasilkan dari perolehan barang dan jasa seperti akun utang usaha, utang gaji dan upah, utang pajak penghasilan, dan sebagainya”.
2. “Penerimaan yang diterima di muka untuk pengiriman barang atau pelaksanaan layanan, seperti pendapatan sewa yang belum merupakan

pendapatan atau pendapatan langganan yang belum merupakan pendapatan”.

3. “Kewajiban lain yang likuidasinya akan terjadi dalam siklus operasi atau satu tahun, seperti porsi obligasi jangka panjang yang harus dibayar pada periode berjalan, kewajiban jangka pendek yang timbul dari pembelian peralatan, atau estimasi kewajiban, seperti sebagai kewajiban garansi. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, estimasi kewajiban sering disebut sebagai ketentuan”.

Menurut Kieso *et al.* (2018), “secara umum terdapat tiga tipe kewajiban jangka panjang (*non-current liabilities*) sebagai berikut”:

1. “Kewajiban yang timbul dari situasi pembiayaan tertentu, seperti penerbitan obligasi, kewajiban sewa jangka panjang, dan wesel bayar jangka panjang”.
2. “Kewajiban yang timbul dari operasi normal perusahaan, seperti kewajiban pensiun dan kewajiban pajak penghasilan tangguhan”.
3. “Kewajiban yang bergantung pada terjadinya atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa masa depan untuk mengkonfirmasi jumlah yang harus dibayar, atau penerima pembayaran, atau tanggal pembayaran, seperti jaminan layanan atau produk, kewajiban lingkungan, dan restrukturisasi, sering disebut sebagai ketentuan”.

Kieso *et al.* (2018), “menjelaskan penyajian liabilitas dalam laporan posisi keuangan dengan contoh sebagai berikut”:

U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A

SCIENTIFIC PRODUCTS, INC.			
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION			
DECEMBER 31, 2019			
Accumulated other comprehensive income (loss)	(8,650)		
Less: Treasury shares	12,750		
Equity attributable to owners		\$886,582	
Non-controlling interest		13,500	
Total equity			\$ 900,082
Non-current liabilities			
Bond liabilities due January 31, 2028	425,000		
Provisions related to pensions	75,000		
Total non-current liabilities		500,000	
Current liabilities			
Notes payable	80,000		
Accounts payable	197,532		
Interest payable	20,500		
Salaries and wages payable	5,560		
Provisions related to warranties	12,500		
Deposits received from customers	4,380		
Total current liabilities		320,472	
Total liabilities			820,472
Total equity and liabilities			\$1,720,554

Gambar 2. 3 Penyajian Liabilitas dalam Laporan Posisi Keuangan

Sumber: Kieso *et al.* (2018)

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2021) dalam KKPK, mengatakan bahwa “ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitas”. Menurut Kieso *et al.* (2018), “ekuitas diklasifikasikan ke dalam enam kategori berikut dalam laporan posisi keuangan, yaitu”:

1. “*Share Capital*”
 “Merupakan nilai nominal atau dinyatakan dari saham yang diterbitkan. Ini termasuk *ordinary shares* (kadang-kadang disebut sebagai *common shares*) dan *preference shares* (kadang-kadang disebut sebagai *preferred shares*)”.
2. “*Share Premium*”
 “Merupakan kelebihan jumlah yang dibayarkan melebihi nilai par atau *stated value*”.
3. “*Retained Earnings*”
 “Merupakan laba bersih yang ditahan oleh perusahaan”.
4. “*Accumulated Other Comprehensive Income*”
 “Merupakan jumlah keseluruhan dari *other comprehensive income*”.


5. “*Treasury Shares*”

“Merupakan saham biasa yang dibeli kembali”.

6. “*Non-Controlling Interest (Minority Interest)*”

“Merupakan sebagian dari ekuitas anak perusahaan yang tidak dimiliki oleh perusahaan”.

Kieso *et al.* (2018), “menjelaskan penyajian ekuitas dalam laporan posisi keuangan dengan contoh sebagai berikut”:



Delhaize Group (in millions)	
Share capital	€ 50
Share premium	2,725
Treasury shares	(56)
Retained earnings	2,678
Other reserves	(1,254)
Shareholders' equity	4,143
Non-controlling interests	52
Total equity	€4,195

Gambar 2. 4 Penyajian Ekuitas dalam Laporan Posisi Keuangan

Sumber: Kieso *et al.* (2018)

2.6 Pengaruh *Debt to Equity Ratio* terhadap Profitabilitas

Menurut Prabowo dan Sutanto (2019), “mengatakan bahwa *debt to equity ratio* (*DER*) merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat solvabilitas dari suatu perusahaan. Dengan demikian, *DER* adalah rasio yang menggambarkan perbandingan total utang dengan ekuitas dalam pendanaan perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri perusahaan tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya”. Menurut Ross *et al.* (2019) “jika *DER* bernilai kurang dari 1, artinya proporsi penggunaan utang dalam struktur modal lebih kecil dibandingkan penggunaan modal. Sebaliknya, jika *DER* bernilai lebih dari 1,

proporsi penggunaan utang dalam struktur modal lebih besar dibandingkan penggunaan modal”. Menurut Robert Ang, (1997) dalam Alfahruqi *et al.* (2022), mengatakan bahwa “semakin tinggi *debt to equity ratio (DER)*, akan semakin tinggi pula risiko yang akan terjadi dalam perusahaan karena pendanaan perusahaan dari unsur utang lebih besar dari pada modal, karena tingkat utang yang semakin tinggi berarti beban bunga perusahaan akan semakin besar mengurangi keuntungan perusahaan”.

Menurut Mboka dan Cahyono (2020) mengatakan bahwa “penggunaan utang yang besar akan meningkatkan beban bunga yang ditanggung perusahaan, sehingga dapat menurunkan profitabilitas perusahaan”. Hal ini didukung oleh penelitian Alfahruqi *et al.* (2022) yang mengatakan bahwa “semakin besar rasio ini, menunjukkan semakin besar kewajiban atau hutang yang harus ditanggung perusahaan dan akan mempengaruhi *ROA*, karena pendapatan bersih yang tersedia akan digunakan sebagian untuk membayar utang. Perusahaan yang memiliki utang banyak akan menimbulkan beban bunga yang banyak pula”. “Beban bunga tersebut tentunya akan mengurangi nilai laba pada perusahaan sehingga dapat menurunkan nilai nilai profitabilitas” (Irawan dan Manda, 2021). “Semakin rendah nilai *debt to equity ratio (DER)* menunjukkan bahwa perubahan utang perusahaan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan mampu menghasilkan keuntungan yang lebih optimal” (Enggarianto dan Hasanah, 2019)

Hal ini didukung oleh Antikasari *et al.* (2020) dan Prabowo dan Sutanto (2019) yang menyatakan bahwa variabel *debt to equity ratio* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Sedangkan menurut Maulita dan Tania (2018) dan Maria *et al.* (2019) yang menyatakan bahwa variabel *debt to equity ratio* berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Berdasarkan teori yang ada maka hipotesis alternatif penelitian pengaruh *debt to equity ratio* terhadap profitabilitas dinyatakan sebagai berikut:

Ha₁: *Debt to Equity Ratio* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas yang diprosikan dengan *Return on Assets*

2.7 Inventory Turnover

Menurut Nurjanah dan Hakim (2018) perputaran persediaan menunjukkan beberapa cepat perputaran persediaan dalam siklus produksi normal. Menurut Kieso *et al.* (2018), “*inventory turnover* dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut”:

$$\text{Inventory Turnover} = \frac{\text{Cost of Goods Sold}}{\text{Average Inventory}} \quad (2.10)$$

$$\text{Average Inventory} = \frac{\text{Inventory}_t + \text{inventory}_{t-1}}{2} \quad (2.11)$$

Keterangan:

Cost of goods sold = harga pokok penjualan

Average Inventory = rata-rata persediaan

Inventory_t = persediaan pada tahun t

Inventory_{t-1} = persediaan 1 tahun sebelum tahun t

“Secara umum persediaan merupakan barang-barang yang dimiliki perusahaan dan barang yang digunakan untuk keperluan perusahaan di masa yang akan datang, persediaan ini meliputi barang produksi dan barang dagang yang dimiliki perusahaan yang nantinya akan didistribusikan dan dijual kembali, dengan demikian persediaan merupakan salah satu komponen perusahaan yang sangat penting, karena jika suatu perusahaan tidak dapat mengelola persediaannya dengan baik, maka akan terjadinya penumpukan persediaan yang mana jika perusahaan terlalu lama menyimpan persediaan maka semakin lambat juga perusahaan mendapatkan laba dari penjualan persediaan tersebut” (Judin *et al.*, 2020). Menurut Lukviarman (2016:55) dalam Hamid (2021), “standar industri perputaran persediaan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Standar Industri Perputaran Persediaan

Standar Industri	Kriteria
> 3,4 kali	Sangat Baik
2,5 – 3,4 kali	Baik
2 – 2,4 kali	Cukup Baik
< 2 kali	Kurang Baik

Sumber: Lukviarman (2016:55)

Menurut Munawir (2004:35) dalam Saragih dan Saragih (2018) “untuk mengukur efisiensi persediaan maka perlu diketahui perputaran persediaan (*inventory turnover*) yang terjadi dengan membandingkan antara harga pokok penjualan (HPP) dengan nilai rata-rata persediaan yang dimiliki”. Menurut Ramadani *et al.* (2021) mengatakan bahwa “persediaan merupakan aktiva lancar yang likuiditas yang paling rendah yang kemungkinan persediaan mengalami kerusakan atau penurunan mutu sehingga nilainya menjadi turun. Hal itu menyebabkan perusahaan mengalami kerugian”.

Menurut Weygandt *et al.* (2018), “perusahaan manufaktur mempunyai tiga jenis persediaan yaitu”:

1. “*Raw Materials*”
“Merupakan barang yang akan digunakan dalam produksi tetapi belum digunakan untuk produksi”.
2. “*Work in Process Inventory*”
“Merupakan barang dari persediaan yang diproduksi yang telah digunakan untuk produksi tetapi belum selesai”.
3. “*Finished Goods Inventory*”
“Merupakan barang-barang manufaktur yang sudah jadi dan siap untuk dijual”.

Menurut Datar dan Rajan (2018), “tiga istilah yang umum digunakan ketika menjelaskan biaya produksi adalah biaya bahan langsung (*direct materials costs*),

biaya tenaga kerja manufaktur langsung (*direct manufacturing labor costs*), dan biaya produksi tidak langsung (*indirect manufacturing costs*)”.

1. “*Direct Materials Costs*”

“Biaya bahan langsung (*direct materials cost*) adalah biaya perolehan semua bahan yang akhirnya menjadi bagian dari objek biaya (barang dalam proses dan kemudian barang jadi) dan dapat ditelusuri ke objek biaya dengan cara yang layak secara ekonomi”.

2. “*Direct Manufacturing Labor Costs*”

“Biaya tenaga kerja manufaktur langsung *direct manufacturing labor costs*) termasuk kompensasi dari semua tenaga kerja manufaktur yang dapat ditelusuri ke objek biaya (barang dalam proses dan kemudian barang jadi) dengan cara yang layak secara ekonomi”.

3. “*Indirect Manufacturing Costs*”

“Biaya produksi tidak langsung (*indirect manufacturing costs*) adalah semua biaya produksi yang berhubungan dengan objek biaya (barang dalam proses dan kemudian barang jadi), tetapi tidak dapat dilacak ke objek biaya tersebut secara cara yang layak secara ekonomi”.

Menurut Kieso *et al.* (2018), “perusahaan menggunakan salah satu dari dua jenis sistem untuk memelihara catatan persediaan yang akurat untuk biaya ini adalah sistem perpetual atau sistem periodic”.

1. “*Perpetual Inventory System*”

“Sistem inventaris perpetual terus melacak perubahan dalam akun Inventaris. Artinya, sebuah perusahaan mencatat semua pembelian dan penjualan (pengeluaran) barang secara langsung di akun persediaan saat terjadi. Fitur akuntansi dari persediaan perpetual sistem adalah sebagai berikut”:

- i) “Pembelian barang dagangan untuk dijual kembali atau bahan baku (*raw materials*) untuk produksi didebit ke persediaan daripada ke pembelian”.

- ii) “*Freight-in* didebit ke persediaan, bukan *purchases*. *Purchases returns and allowances* dan diskon pembelian dikreditkan ke persediaan daripada ke akun terpisah”.
- iii) “Harga pokok penjualan (*cost of goods sold*) dicatat pada saat setiap penjualan dengan mendebet *cost of goods sold* dan mengkredit persediaan”.
- iv) “Buku besar pembantu (*subsidiary ledger*) dari catatan persediaan individu dipelihara sebagai pengendalian ukuran. Catatan anak perusahaan menunjukkan jumlah dan biaya setiap jenis persediaan yang tersedia”.

2. “*Periodic Inventory System*”

“Didalam sistem persediaan periodik (*periodic inventory system*), perusahaan menentukan jumlah persediaan di tangan hanya secara berkala, seperti namanya. Mencatat semua akuisisi dari *inventory* selama periode akuntansi dengan mendebet akun pembelian. Sebuah perusahaan kemudian menambahkan total dalam akun pembelian pada akhir periode akuntansi ke biaya persediaan yang ada pada awal periode. Jumlah ini menentukan total harga pokok barang yang tersedia untuk dijual selama periode tersebut”.

Menurut Weygandt *et al.* (2019), “terdapat dua metode arus biaya yang diasumsikan”:

1. “*First-in, first-out (FIFO)*”

“Metode *first-in, first-out (FIFO)* mengasumsikan bahwa barang yang paling awal dibeli adalah barang yang pertama dijual. *FIFO* sering kali paralel dengan arus fisik barang dagangan yang sebenarnya. Artinya, umumnya merupakan praktik bisnis yang baik untuk menjual unit tertua terlebih dahulu. Oleh karena itu, menurut metode *FIFO*, biaya perolehan barang paling awal yang pertama kali diakui untuk menentukan harga pokok penjualan”.

2. “*Average-cost*”

“*Average-cost method* mengalokasikan harga pokok barang tersedia untuk dijual berdasarkan biaya rata-rata tertimbang per unit (*weighted-average unit cost*). *Weighted-average unit cost* didapatkan dengan membagi *cost of goods available for sale* dengan *total units available for sale*”.

Menurut Kieso *et al.* (2018), “Harga pokok barang yang tersedia untuk dijual atau digunakan adalah jumlah dari (1) harga pokok barang yang ada pada awal periode, dan (2) harga pokok barang diperoleh atau diproduksi selama periode tersebut. Harga pokok penjualan adalah selisihnya antara (1) harga pokok barang yang tersedia untuk dijual selama periode tersebut, dan (2) biaya barang di tangan pada akhir periode”.

Kieso *et al.* (2018), menjelaskan penyajian perhitungan dari *cost of goods sold* dengan contoh sebagai berikut:

Beginning inventory, Jan. 1	\$100,000
Cost of goods acquired or produced during the year	<u>800,000</u>
Total cost of goods available for sale	900,000
Ending inventory, Dec. 31	<u>(200,000)</u>
Cost of goods sold during the year	<u>\$700,000</u>

Gambar 2. 5 Penyajian Perhitungan Cost of Goods Sold

Sumber: Kieso *et al.* (2018)

Menurut Datar dan Rajan (2018), “terdapat langkah-langkah untuk menghitung harga pokok penjualan (*cost of goods sold*) pada perusahaan manufaktur sebagai berikut”:

1. “Cost of Direct Materials Used”

“*Beginning inventory of direct materials*”

“+ *Purchases of direct materials*”

“- *Ending inventory of direct materials*”

“= *Direct materials used*”

2. “*Total Manufacturing Costs Incurred*”

- “Direct materials used”
 “+ Direct manufacturing labor”
 “+ Manufacturing overhead costs”
 “= Total manufacturing costs incurred”
 3. “Cost of Goods Manufactured”
 “Beginning work-in-process inventory”
 “+ Total manufacturing costs incurred”
 “= Total manufacturing costs to account for”
 “– Ending work-in-process inventory”
 “= Cost of goods manufactured”
 4. “Cost of Goods Sold”
 “Beginning inventory finished goods”
 “+ Cost of goods manufactured”
 “– Ending inventory finished goods”
 “= Cost of goods sold”

Datar dan Rajan (2018), “menjelaskan penyajian laporan laba rugi dan *schedule of cost of goods manufactured* dari perusahaan sektor manufaktur, dengan contoh sebagai berikut”:



CELLULAR PRODUCTS			
INCOME STATEMENT			
For the Year Ended December 31, 2017 (in thousands)			
5	Revenues		\$210,000
6	Cost of goods sold		
7	Beginning finished goods inventory, January 1, 2017	\$ 22,000	
8	Cost of goods manufactured (see Panel B)	104,000	
9	Cost of goods available for sale	126,000	
10	Ending finished goods inventory, December 31, 2017	18,000	
11	Cost of goods sold		108,000
12	Gross margin (or gross profit)		102,000
13	Operating (period) costs:		
14	R&D, design, mktg., dist., and cust.-service cost	70,000	
15	Total operating costs	70,000	
16	Operating income		\$ 32,000
CELLULAR PRODUCTS			
SCHEDULE OF COST OF GOODS MANUFACTURED*			
For the Year Ended December 31, 2017 (in thousands)			
22	Direct materials:		
23	Beginning inventory, January 1, 2017	\$ 11,000	
24	Purchases of direct materials	73,000	
25	Cost of direct materials available for use	84,000	
26	Ending inventory, December 31, 2017	8,000	
27	Direct materials used		\$ 76,000
28	Direct manufacturing labor		9,000
29	Manufacturing overhead costs:		
30	Indirect manufacturing labor	\$ 7,000	
31	Supplies	2,000	
32	Heat, light, and power	5,000	
33	Depreciation—plant building	2,000	
34	Depreciation—plant equipment	3,000	
35	Miscellaneous	1,000	
36	Total manufacturing overhead costs		20,000
37	Manufacturing costs incurred during 2017	105,000	
38	Beginning work-in-process inventory, January 1, 2017	6,000	
39	Total manufacturing costs to account for	111,000	
40	Ending work-in-process inventory, December 31, 2017	7,000	
41	Cost of goods manufactured (to income statement)		\$104,000

Gambar 2. 6 Penyajian Laporan Laba Rugi dan *Schedule of Cost of Goods Manufactured*

Sumber: Datar dan Rajan (2018)

2.8 Pengaruh *Inventory Turnover* terhadap Profitabilitas

Menurut Munawir (2004:35) dalam Saragih dan Saragih (2018), mengatakan bahwa “untuk mengukur efisiensi persediaan maka perlu diketahui perputaran persediaan (*inventory turnover*) yang terjadi dengan membandingkan antara harga pokok penjualan (HPP) dengan nilai rata-rata persediaan yang dimiliki. Perputaran persediaan menunjukkan berapa kali dana tertanam dalam persediaan berputar (diganti) dalam suatu periode. Semakin tinggi tingkat perputaran persediaan tersebut maka jumlah modal kerja yang dibutuhkan (terutama yang harus diinvestasikan dalam persediaan) semakin rendah”.

Menurut Nurjanah dan Hakim (2018), mengatakan bahwa “semakin tinggi perputaran persediaan, maka semakin singkat atau semakin baik waktu rata-rata antara penanaman modal dan transaksi penjualan sehingga pertumbuhan laba mengalami peningkatan. Dalam rasio perputaran persediaan akan diketahui perbandingan antara penjualan dengan persediaan rata-rata yang dinilai dari harga

jual atau didasarkan pada harga pokok penjualan dengan rata-rata persediaan (persediaan awal periode ditambah dengan persediaan akhir dibagi dua), sehingga dapat diketahui berapa kali persediaan berputar dalam satu periode dan semakin besar perputarannya maka akan semakin baik. Sehingga berdampak baik terhadap profitabilitas karena perputaran persediaan tinggi maka tinggi pula tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan”.

Menurut Judin *et al.* (2020), mengatakan bahwa “perputaran persediaan adalah cara entitas dalam mengukur berapa kali dana yang tertanam dalam persediaan berputar dalam satu periode, jika semakin tinggi perputaran yang terjadi maka semakin efisien dan efektif pula pengelolaan persediaan yang dilakukan manajemen”.

Menurut Jennah dan Yuli (2019), mengatakan bahwa “pada prinsipnya perputaran persediaan mempermudah atau memperlancar jalannya operasi perusahaan yang harus dilakukan secara berturut-turut untuk memproduksi barang-barang serta mendistribusikannya kepada pelanggan. Semakin tinggi perputaran persediaan barang, maka semakin tinggi biaya yang dapat ditekan sehingga semakin besar perolehan laba suatu perusahaan. Sebaliknya, jika semakin lambat perputaran persediaan barang, semakin kecil pula laba yang diperolehnya”.

Menurut Umayta *et al.* (2019), “perusahaan membutuhkan persediaan untuk menjaga proses produksi tetap lancar sehingga dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Perputaran persediaan menggambarkan frekuensi konversi persediaan menjadi kas untuk periode tertentu. Jika tingkat turnover tinggi, maka tingkat risiko dan jumlah persediaan tidak terlalu besar. Sehingga apabila tingkat perputaran persediaan tinggi maka akan meningkatkan profitabilitas dengan memangkas biaya tersebut.”. Menurut Eforis dan Pioleta (2019), “persediaan yang terjual semakin banyak berarti terjadi peningkatan penjualan barang dagang dan juga dapat meminimalkan timbulnya risiko dan biaya terkait dengan persediaan seperti *carrying costs*. Dengan adanya peningkatan penjualan persediaan dan minimalisasi biaya persediaan, maka terjadi peningkatan *income* yang pada akhirnya akan meningkatkan profitabilitas perusahaan”.

Hal ini didukung oleh Saragih dan Saragih (2018), Nurjanah dan Hakim (2018), dan Ramadani *et al.* (2021) yang menyatakan bahwa variabel perputaran persediaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Sedangkan menurut Amelia dan Cahyono (2020) yang menyatakan bahwa variabel perputaran persediaan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Berdasarkan teori yang ada maka hipotesis alternatif penelitian pengaruh perputaran persediaan terhadap profitabilitas dinyatakan sebagai berikut:

Haz: *Inventory Turnover* berpengaruh positif terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Assets*

2.9 Cash Turnover

Menurut Kieso *et al.* (2018), mengatakan bahwa “aset merupakan sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan mengalir ke entitas. Kas merupakan aset yang paling likuid, dimana kas adalah alat tukar standar dan dasar untuk mengukur dan menghitung semua item lainnya”. Menurut Firman (2018), “perputaran kas merupakan kemampuan kas dalam menghasilkan pendapatan sehingga dapat dilihat berapa kali uang kas berputar dalam satu periode tertentu tingkat perputaran kas menunjukkan kecepatan perubahan kembali aktiva lancar menjadi kas melalui penjualan, makin tinggi tingkat perputaran kas, piutang dan persediaan menunjukkan tingginya volume penjualan”.

Menurut Judin *et al.* (2020), “kas merupakan salah satu komponen penting yang harus ada di perusahaan, karena dengan adanya kas aktivitas operasi perusahaan bisa berjalan dengan baik. Entitas harus menjaga jumlah kas tetap stabil agar sesuai dengan kebutuhannya. Jika jumlah kas berkurang, maka kegiatan operasional pun akan terganggu, tetapi jika terlalu banyak kas dalam perusahaan, dapat menyebabkan entitas tidak dapat memanfaatkan kas tersebut untuk mendapat imbal hasil yang lebih tinggi”. Menurut Riyanto (2010:95) dalam Saragih dan Saragih (2018), “perputaran kas merupakan periode berputarnya kas dimulai pada

saat dimana kas itu diinvestasikan dalam modal kerja yang tingkat likuiditasnya paling tinggi”. “*Cash turnover* dapat dicari dengan rumus sebagai berikut”:

$$\text{Cash Turnover} = \frac{\text{Penjualan Bersih}}{\text{Rata-rata Kas}} \quad (2.12)$$

$$\text{Rata-rata Kas} = \frac{\text{Kas Awal} + \text{Kas Akhir}}{2} \quad (2.13)$$

Keterangan:

Cash Turnover = Perputaran kas

Menurut Weygandt *et al.* (2019), mengatakan bahwa “kas adalah satu-satunya aset yang siap dikonversi menjadi jenis aset lainnya. Itu juga mudah disembunyikan dan diangkut, dan sangat diinginkan. Karena karakteristik ini, uang tunai adalah aset yang paling rentan terhadap aktivitas penipuan. Selain itu, karena volume transaksi tunai yang besar, dapat terjadi banyak kesalahan dalam pelaksanaan dan pencatatannya. Untuk mengamankan kas dan untuk memastikan keakuratan catatan akuntansi untuk kas, pengendalian internal yang efektif atas kas adalah penting”. Menurut Kieso *et al.* (2018), mengatakan bahwa “pencatatan kas diklasifikasikan menjadi”:

1. “*Cash Equivalents*”
 “Merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang diketahui dan sangat dekat dengan jatuh temponya sehingga menimbulkan risiko perubahan nilai yang tidak signifikan karena perubahan suku bunga”.
2. “*Restricted Cash*”
 “*Petty cash*, penggajian, dan dividen adalah contoh kas yang disisihkan untuk tujuan tertentu”.
3. “*Bank Overdrafts*”
 “*Bank overdrafts* terjadi ketika sebuah perusahaan menulis cek lebih dari jumlahnya dalam rekening kasnya”.

2.10 Pengaruh *Cash Turnover* terhadap Profitabilitas

Menurut Dharma *et al.* (2019), mengatakan bahwa “perputaran kas merupakan periode berputarnya kas dimulai pada saat dimana kas itu diinvestasikan dalam modal kerja yang tingkat likuiditasnya paling tinggi. Ini berarti semakin besar jumlah kas yang dimiliki perusahaan berarti besar kemungkinan akan semakin rendah perputarannya”. Amelia dan Cahyono (2020), mengatakan bahwa “modal kerja penting dalam pengelolaan kas agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan, maka kas harus diputar dengan baik. Tingkat perputaran kas akan berdampak langsung terhadap keuntungan. Semakin tinggi tingkat perputaran kas berarti semakin tinggi efisiensi penggunaan kasnya dan semakin cepat kembalinya kas masuk pada perusahaan. Dengan demikian, kas akan dapat dipergunakan kembali untuk membiayai kegiatan operasional sehingga tidak mengganggu kondisi keuangan perusahaan”. Menurut Judin *et al.* (2020), mengatakan bahwa “perputaran kas mencerminkan efektivitas modal yang dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan, karena semakin tinggi siklus perputaran kas maka semakin tinggi dan makin efisien juga penggunaan kas perusahaan tersebut, karena dana yang menganggur pada kas akan semakin kecil”.

Menurut Firman (2018), “pada umumnya suatu perusahaan didirikan dengan tujuan untuk memperoleh laba. Laba merupakan hasil yang menguntungkan atas usaha yang dilakukan perusahaan pada suatu periode tertentu. Dengan laba ini dapat digunakan perusahaan untuk tambahan pembiayaan dalam menjalankan operasional perusahaan dan yang terpenting adalah sebagai alat untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Besar atau kecilnya laba yang dihasilkan perusahaan tergantung kepada kemampuan perusahaan dalam mengelola aktiva yang dimiliki oleh perusahaan”.

“Semakin baik pengelolaan aktiva yang dimiliki, maka akan semakin optimal laba yang akan dihasilkan oleh perusahaan. Dalam pengelolaan kas sering terjadi adanya pengangguran uang kas yang berlebihan. Uang kas yang tersedia tidak dipergunakan secara maksimal untuk kegiatan operasional perusahaan,

sehingga mengurangi tingkat laba yang diharapkan dapat tercapai pada periode berjalan. Dengan mengetahui tingkat perputaran kas, maka dapat dikatakan efektif penggunaan modal kerja kas yang bersangkutan”. Menurut Umayta *et al.* (2019), “apabila pengelolaan kas dilakukan secara efektif, perputaran kas akan meningkat. Sehingga dapat meningkatkan laba dan hasil penjualan dan tidak mengganggu keuangan perusahaan”.

Hal ini didukung oleh Firman (2018), Amelia dan Cahyono (2020) dan Judin *et al.* (2021) yang menyatakan bahwa variabel *cash turnover* berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Sedangkan menurut Saragih dan Saragih (2018), dan Ramadani *et al.* (2021) menyatakan bahwa *cash turnover* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Berdasarkan teori yang ada maka hipotesis alternatif penelitian pengaruh perputaran persediaan terhadap profitabilitas dinyatakan sebagai berikut:

Ha3: *Cash Turnover* berpengaruh positif terhadap profitabilitas yang diprosikan dengan *Return on Assets*

2.11 Good Corporate Governance

“*Good corporate governance* adalah peraturan yang diberikan perusahaan pada berbagai pihak untuk menjelaskan bagaimana hubungan antara pihak manajemen, pemilik perusahaan, kreditur, pemerintah, karyawan dan pihak yang berkepentingan dalam perusahaan untuk menjadi panduan dalam menjalankan kinerja perusahaan” (Lumbanraja dan Nusantara, 2021). Menurut Solekhah (2020) “penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* memiliki tujuan untuk meningkatkan laba (*profit*) dalam perusahaan. Dengan mengetahui pengaruh dan dampak yang akan didapatkan oleh perusahaan jika menerapkan *Good Corporate Governance (GCG)* maka perusahaan dapat mempertimbangkan peran penting penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* di suatu perusahaan untuk mendapatkan laba (*profit*) yang besar dan dapat meminimalisir dampak negatif yang timbul bagi perusahaan”.

“Prinsip-prinsip Good Corporate Governance menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-117/M-MBU/2002”:

1. “Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan”;
2. “Kemandirian, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat”;
3. “Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif”;
4. “Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat”;
5. “Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Menurut Pasaribu dan Simatupang (2019) “dengan seiring perkembangan zaman yang semakin modern yang di mana para pebisnis sangat berkembang apalagi di Indonesia sendiri. Setiap perusahaan selalu ingin terlihat dinamis dengan seiring adanya kemajuan pasar dengan berdasarkan keinginan para konsumen. Peraturan perusahaan yang ketat membuat para pesaing ingin mendapatkan pujian, tetapi dengan peraturan pesaing yang semakin ketat diharapkan setiap perusahaan agar memperhatikan perusahaannya agar selalu baik dan unggul”.

Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) (2006) dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia menyatakan Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan *GCG*. Namun demikian, Dewan Komisaris tidak

boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara. Tugas Komisaris Utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris. Agar pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut (KNKG, 2006):

1. Komposisi Dewan Komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.
2. Anggota Dewan Komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa Direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan.
3. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.

Otoritas Jasa Keuangan (2014) dalam POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik mendefinisikan Dewan Komisaris adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Selanjutnya dalam Pasal 20, Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. 1 (satu) di antara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi komisaris utama atau presiden komisaris (OJK dalam POJK Nomor 33/POJK.04/2014,2014).

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2006) dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia menjelaskan terdapat beberapa fungsi pengawasan Dewan Komisaris yaitu:

1. Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Dalam hal Dewan Komisaris mengambil keputusan mengenai hal-hal yang ditetapkan dalam anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan, pengambilan keputusan tersebut dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas, sehingga keputusan kegiatan operasional tetap menjadi tanggung jawab Direksi. Kewenangan yang ada pada Dewan Komisaris tetap dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas dan penasihat (KNKG, 2006).
2. Dalam hal diperlukan untuk kepentingan perusahaan, Dewan Komisaris dapat mengenakan sanksi kepada anggota Direksi dalam bentuk pemberhentian sementara, dengan ketentuan harus segera ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan RUPS (KNKG, 2006).
3. Dalam hal terjadi kekosongan dalam Direksi atau dalam keadaan tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar, untuk sementara Dewan Komisaris dapat melaksanakan fungsi Direksi (KNKG, 2006).
4. Dalam rangka melaksanakan fungsinya, anggota Dewan Komisaris baik secara bersama-sama dan atau sendiri-sendiri berhak mempunyai akses dan memperoleh informasi tentang perusahaan secara tepat waktu dan lengkap (KNKG, 2006).
5. Dewan Komisaris harus memiliki tata tertib dan pedoman kerja (*charter*) sehingga pelaksanaan tugasnya dapat terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja mereka (KNKG, 2006).
6. Dewan Komisaris dalam fungsinya sebagai pengawas, menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan perusahaan

oleh Direksi, dalam rangka memperoleh pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) dari RUPS (KNKG, 2006).

7. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dapat membentuk komite. Usulan dari komite disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh keputusan. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, sekurang-kurangnya harus membentuk Komite Audit, sedangkan komite lain dibentuk sesuai dengan kebutuhan (KNKG, 2006).

Otoritas Jasa Keuangan (2014) dalam POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik menjelaskan Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 33/POJK.04/2014. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 33/POJK.04/2014. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut (OJK,2014):

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya (OJK dalam POJK Nomor 33/POJK.04/2014, 2014);
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut (OJK dalam POJK Nomor 33/POJK.04/2014, 2014);

3. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut (OJK dalam POJK Nomor 33/POJK.04/2014, 2014); dan
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut (OJK dalam POJK Nomor 33/POJK.04/2014, 2014).

Keberadaan komisaris independen akan mendorong dan menciptakan iklim yang lebih independen, objektif dan meningkatkan kesetaraan (*fairness*) sebagai salah satu prinsip utama dalam memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya (Subrata, 2020). Berkaitan dengan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), tugas komisaris independen adalah (Subrata, 2020):

1. Menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan.
2. Mengusahakan perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang lain.
3. Diungkapkannya transaksi yang mengandung benturan kepentingan secara wajar dan adil.
4. Mengusahakan kepatuhan perusahaan pada perundangan dan peraturan yang berlaku.
5. Menjamin akuntabilitas organ perseroan (organ perseroan misalnya rapat umum pemegang saham).

Menurut Subiyanti dan Zannati (2019) *Good Corporate Governance (GCG)* dapat diukur dengan menggunakan rumus Dewan Komisaris Independen (DKI). Dewan Komisaris Independen (DKI) merupakan rumus yang mengukur persentase perbandingan jumlah Dewan Komisaris Independen terhadap jumlah Anggota Dewan Komisaris. Rumus Dewan Komisaris Independen adalah sebagai berikut:

$$DKI = \frac{\text{Jumlah Dewan Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Anggota Dewan Komisaris}} \times 100\% \quad (2.14)$$

2.12 Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Profitabilitas

Menurut Intia dan Azizah (2021), mengatakan bahwa “Dewan komisaris independen merupakan agen pengawas seperti komisaris tetapi tidak memiliki hubungan dekat dengan pemegang saham perusahaan yang memiliki wewenang untuk mengawasi dan melindungi pemegang saham minoritas dan berperan penting dalam proses pengambilan keputusan. Komisaris independen yang lebih banyak jumlahnya, akan memiliki tingkat pengawasan yang semakin baik sehingga akan meminimalisir kemungkinan manajer melakukan praktik-praktik untuk kepentingan manajemen sendiri, dan kinerja keuangan perusahaan semakin baik”. Menurut Maulana (2020) “hadirnya Komisaris independen, diharapkan akan menjamin kepentingan pemegang saham minoritas dalam sebuah perusahaan karena dewan komisaris independen perusahaan dapat mengawasi langsung kinerja perusahaan tanpa terikat dengan kepentingan lain”.

Hal ini didukung oleh Subiyanti dan Zannati (2019) yang menyatakan bahwa variabel *good corporate governance (GCG)* yang diproksikan dengan dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Sedangkan menurut Solekhah dan Efendi (2020), variabel *good corporate governance (GCG)* yang diproksikan dengan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Berdasarkan teori yang ada maka hipotesis alternatif penelitian pengaruh perputaran persediaan terhadap profitabilitas dinyatakan sebagai berikut:

H_{a4}: *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Assets*

2.13 Pengaruh *DER, Inventory Turnover, Cash Turnover, dan Good Corporate Governance* secara simultan terhadap Profitabilitas

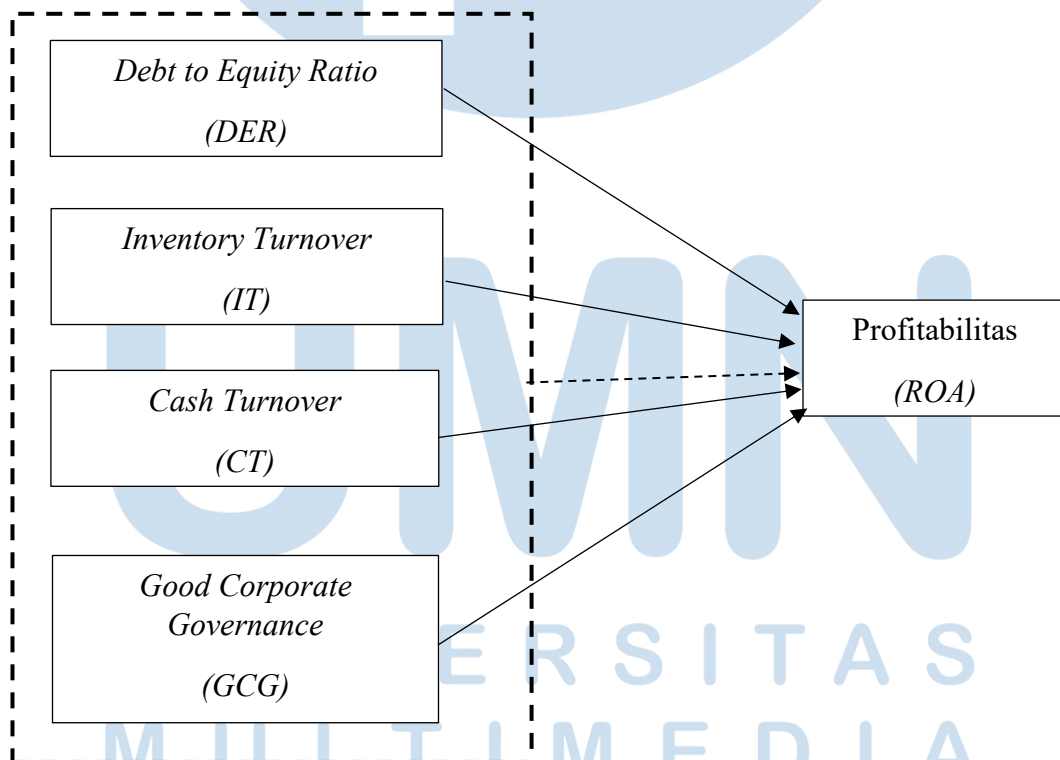
Judin *et al.* (2020) secara simultan perputaran kas dan perputaran persediaan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Harisa *et al.* (2019) secara simultan variabel kualitas dari pengungkapan *GCG, leverage* dan ukuran perusahaan

berpengaruh signifikan profitabilitas. Mulita dan Tania (2018) secara simultan *DER*, *DAR*, dan *LDER* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Penelitian ini sejalan dengan Dewi dan Estiningrum (2018) yang menyatakan bahwa *Current Ratio*, *Debt to Equity Ratio*, *Total Assets Turnover* dan *Net Profit Margin* berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas. Solekhah dan Efendi (2020) menyatakan bahwa variabel *good corporate governance* secara simultan dan signifikan berpengaruh terhadap profitabilitas. Amelia dan Cahyono (2020) menyatakan bahwa variabel perputaran modal kerja yang terdiri dari perputaran kas, perputaran piutang dan perputaran persediaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel profitabilitas

2.14 Model Penelitian

Model penelitian yang digunakan adalah:



Gambar 2. 7 Model Penelitian